PERAN HKTI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh Ir Hj Rini S Soemarno

I. Dasar Pemikiran.

Pertanian sepertiga dari luas permukaan bumi merupakan pusat kegiatan dari sebagian besar penduduk dunia. Kegiatan perdesaan sangat erat terkait dengan lingkungan hidup, hanya dengan menambahkan sedikit nilai untuk meningkatkan produksinya, tanpa disadari penggunaan pola konsumsi dan produksi yang tidak mendukung dan pengelolaan yang kurang tepat, akan menimbulkan berbagai gangguan lingkungan hidup sekitarnya. Masyarakat petani termasuk masyarakat di perdesaan, terutama perempuan tani dan perempuan desa, merupakan pengelola sumber daya alam yang tangguh. Untuk kehidupannya, petani harus melindungi atau mempertahankan lingkungan hidup karena keluarga tani dan keluarga di pedesaan sangat tergantung pada alam sekitarnya. Manusia menjadi perhatian utama dalam pembangunan yang berkesinambungan. Manusia berhak atas hidup yang sehat dan produktif dalam keseimbangan dan keselarasan dengan alam.

Selanjutnya, penduduk asli dan atau perempuan, memiliki pengetahuan khusus tentang hubungan antara ekologi dengan kerapuhan pengelolaan ekosistem. Mereka dapat memainkan peran yang sangat penting khususnya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan tentang pola konsumsi yang berkelanjutan. Selain itu, perempuan seringkali memberikan sumbangan pada pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui kampanye-kampanye pada masyarakat golongan bawah *(grass root)* dan pemuda untuk

melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pada tingkat lokal tindakan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup secara desentralisasi sangat diperlukan dan sangat menentukan.

HKTI adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri di bidang pertanian serta pembangunan pedesaan dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat kaum tani serta penduduk pedesaan. Tugas pokok HKTI antara lain membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama kelompok, asosiasi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan serta menggerakkan dan mengarahkan peran serta kaum tani, penduduk perdesaan dan pelaku agribisnis lainnya dalam pembangunan nasional. Struktur Organisasi terdiri dari Organisasi Tingkat Nasional, Organisasi Tingkat Propinsi, Organisasi Tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratip, Organisasi Tingkat Kecamatan dan Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.

HKTI sebagai organisasi massa profesi merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam mengupayakan membangun "pertanian lestari" yang telah dirintis dan terbukti memberi harapan harus didorong menjadi "persyaratan baku" dalam strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Pertanian lestari memiliki pengertian praktek usaha yang memberikan manfaat saat ini juga akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang secara terus menerus. Untuk mewujudkan itu pertanian lestari memiliki prinsip-prinsip tidak merusak lingkungan hidup, memberikan manfaat ekonomi secara layak, penerapan teknologi bijaksana tanpa mempertentangkan tradisional dan modern, dapat diterima oleh masyarakat pelaku dan pemanfaat, serta menghargai budaya yang beragam.

II. Kondisi dan Permasalahan

Di daerah-daerah tertentu, perempuan pada umumnya merupakan anggota masyarakat yang menetap, karena laki-laki seringkali bekerja di lokasi-lokasi yang jauh dan meninggalkan perempuan untuk menjaga lingkungan hidup alam untuk menjamin tetap tersedianya sumber daya secara memadai dan berkelanjutan dalam rumah-tangga dan kelompok masyarakatnya. Namun, mereka memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan produktif, teknologi, pelatihan, kredit (pinjaman), program-program pembangunan dan struktur koperasi yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kesadaran tentang semakin menipisnya sumber daya, kemerosotan ekosistem dan bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran telah meningkat secara berarti dalam dasawarsa terakhir ini. Keadaan yang semakin memburuk tersebut menghancurkan ekosistem yang rentan, dan menggeser kelompok-kelompok manusia, terutama perempuan, dari kegiatan-kegiatan produktif dan merupakan ancaman yang semakin besar terhadap lingkungan hidup. Melalui pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam, perempuan menghasilkan makanan bagi keluarganya dan kelompoknya. Sebagai konsumen dan produser, pengurus keluarga dan pendidik, perempuan memegang peran sangat penting dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan melalui perhatiannya terhadap mutu dan kelangsungan hidup generasi yang sekarang dan yang akan datang.

Pada umumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan memiliki pengalaman yang berharga, ketrampilan dan sumber daya manusia, namun pengalaman bekerjasama yang efektif untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup

belum nampak, sehingga proses kerjasama untuk mencapai kemitraan yang saling menguntungkan dalam berbagi informasi dan keberhasilannya sangat diperlukan. Salah satu contoh *(lesson learned)* adalah keberhasilan penggunaan tehnologi tepat guna di tingkat bawah *(grass root)* yang sangat sederhana yakni pertanian terpadu ternak dan tanaman di satu areal memberikan dampak negatif yang kecil/minimum terhadap kerusakan lingkungan hidup dibandingkan dengan penggunaan berbagai teknologi canggih dengan menggunakan berbagai pupuk buatan maupun pestisida.

Kecamatan Pandang Pandang Kabupaten Gowa
Kelompok Tani Organik Mangasa
Dampingan YLK Kunjungan Lapang Pokja RAN PKTP ke Makassar
tgl **26 – 28 November 2001**

Terbentuk sejak 1993, semula anggotanya 15 orang, sekarang menjadi 35 orang laki-laki dan perempuan mengelola lahan seluas 35 Ha, melaksanakan penanaman dengan pupuk organik sejak 1998, diawali dengan "demplot" oleh 5 anggota inti (4 laki-laki dan satu perempuan). Tujuan pertanian organik adalah dalam rangka "hidup sehat", produksi pertanian organik bebas dari pestisida. Ketua Kelompok Tani Organik Bapak Fatahudin (Deng Bela) wakil adalah Hj Nurdjani (Deng Mamang).

Masyarakat belum memahami arti tanaman hasil pertanian organik, demikian pula Dinas Pertanian agak enggan mendukung upaya pertanian organik di daerah Gowa ini, karena program KUT termasuk penyediaan dan penggunaan pesticida dan pupuk buatan. Tujuan LSM bertolak belakang dengan kebijakan Dinas Pertanian, jauh sebelum program "Bimas", kelompok tani ini telah melaksanakan pupuk organik dengan cara membawa ternaknya ke ladang (kotoran

ternak), dan "gender" bukan masalah baru bagi kelompok tani organik Pandang Pandang. Pernah dilakukan "uji coba pertanian organik" yang dilakukan oleh ***"Pesticide Action Network"*** disamping menanam ikan nila bogor.

Beberapa aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ternyata merupakan aspek-aspek lintas bidang maupun lintas wilayah *(cut across regions)* , yakni: meningkatkan peranserta dan masyarakat penerima manfaat, membangun dan berbagi pengalaman mengenai teknologi ramah lingkungan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program untuk pengelolaan lingkungan hidup, dan mendorong kegiatan pendanaan di desa untuk keperluan *off farm* serta keuangan-mikro yang tidak berpihak pada lingkungan hidup agar peduli pada sumberdaya alam. Isu lintas bidang yang tidak kalah pentingnya adalah *gender* dan pengetahuan khusus penduduk-asli/masyarakat-lokal tentang hubungan antara ekologi dengan kerapuhan pengelolaan ekosistem.

Kemerosotan lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkannya, bervariasi pada setiap lintas wilayah dan lintas bidang, menimbulkan kebijakan-kebijakan dan program-program di bidang pengelolaan, pelestarian, perlindungan dan pembaruan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sangat beragam sesuai situasi dan kondisi lokal.

Tindakan strategis yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang sehat membutuhkan **komitmen dari berbagai pelaku** baik pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP HKTI), mengembangkan kerjasama dalam rangka meningkatkan peran petani dalam pengelolaan lingkungan hidup di seluruh Indonesia.

c. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

a. Menciptakan strategi dan mekanisme untuk meninmgkatkan proporsi masyarakat petani, khususnya perempuan dan masyarakat tingkat bawah *(grass root)*, yang dilibatkan sebagai pengambil keputusan, perencana, pengelola, dan sebagai penerima manfaat dari rancangan, pengembangan dan pelaksanaan kebijaksanaan dan program untuk pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

b. Mendorong proses pengambilan keputusan di tingkat wilayah melalui penguatan dan peranserta organisasi masyarakat petani di tingkat desa yang memperoleh wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan sumberdaya alam untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

c. Mengsosialisasikan dan memperkuat kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi tepat guna, mencakup pengetahuan dan ketrampilan penduduk asli. Menyusun kerangka-kerja yang melibatkan secara aktif masyarakat petani dengan mengungkapkan secara rinci pengalaman keberhasilan masyarakat petani di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan pertanian lestari di wilayahnya *(in situ)*;

B. Sasaran

a. Peranserta aktif masyarakat petani serta para profesional / ahli lingkungan hidup;

a Organisasi Kemasyarakatan peduli lingkungan hidup khususnya HKTI;

b Institusi pemerintah terkait dengan lingkungan hidup yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Depaartemen Pertanian,

Departemen Kehutanan, Departemen Perikanan, Departemen Kesehatan dan LIPI;

d. Kegiatan HKTI dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup selama ini cenderung *"top down"* kurang memperhatikan kepentingan masyarakat petani dan masyarakat perdesaan, hal ini mengakibatkan kurangnya keberhasilan dalam perlindungan lingkungan hidup. Tanpa melibatkan masyarakat petani dan masyarakat pedesaan, sulit kita mengidentifikasi dan mengetahui apa yang dihadapi dan dibutuhkan masyarakat petani. Disisi lain masyarakat petani dan pedesaan memiliki ketrampilan dan pengetahuan secara tradisional dalam mengelola lingkungan hidup, namun tidak atau belum mampu bekerja sama dengan institusi/lembaga pemerintah untuk secara bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

Tokoh masyarakat, tokoh tradisional baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan, tingkat kabupaten / kota sampai dengan tingkat provinsi dan nasional bersama-sama pemerintah hendaknya mengadakan gerakan serempak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatannya, dimulai sejak proses paling awal yakni dalam mengidentifikasi permasalahan, menentukan berbagai alternatif pemecahan, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan selanjutnya dalam mengevaluasi dan memonitor hasil pengeloalaan lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari tingkat paling bawah, yakni di tingkat desa, dimana masyarakat petani akan merasakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah miliknya dan akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial setempat.

Kita ketahui bersama bahwa proses keterlibatan berbagai pelaku untuk mengelola lingkungan hidup merupakan proses jangka panjang dan secara berkelanjutan, oleh karena itu langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah "Kampanye sadar lingkungan hidup", dengan melibatkan pula kelompok-kelompok penduduk asli / suku terasing. Kampanye dilakukan melalui pertemuan-pertemuan informal, kelompok-kelompok diskusi antar desa/wilayah dimana isu-nya dapat diangkat sampai ketingkat nasional. Dengan demikian akan dapat tersusun program nasional yang menampung aspirasi dan kehendak dari masyarakat petani (*bottom up),* sehingga dapat dijadikan acuan bagi berbagai sektor untuk menyusun kegiatan masing-masing yang bermanfaat bagi masyarakat petani dan masyarakat pedesaan.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan seluruh jajarannya siap bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Kegiatan yang terkait dengan "pengelolaan"
   a Institusi/lembaga pemerintah **memastikan dukungan** terhadap pelaksanaan **"pertanian lestari",** pembangunan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan, pengelolaan ekosistem yang rentan, penggunaan air untuk pertanian, dan pengendalian hama terpadu;
   b Institusi/lembaga pemerintah agar **melibatkan masyarakat petani** dan/atau organisasi HKTI **sejak dini** dalam menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
   c **Mendorong inovasi** dan praktek-praktek yang dilakukan oleh golongan **penduduk asli dan masyarakat lokal,** termasuk praktek-praktek yang berkaitan dengan obat-obatan tradisional, keanekaragaman hayati dan teknologi penduduk asli, dan melakukan usaha untuk menjamin agar hal-hal

tersebut dihormati, dipelihara, **dikembangkan dan dilestarikan** dalam suatu ekologi yang berkelanjutan, dan menerapkannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keleterlibatan orang-orang yang memiliki pengetahuan;

d Mengajukan dan **mengangkat masalah-masalah** pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam **yang diminati masyarakat** lokal, utamanya perempuan, dan memberikan informasi untuk memberikan kontribusi dan memobilisasi sumberdaya dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

B. Data dan informasi

a Mengembangkan **pangkalan data,** sistem-sistem penerangan dan **pemantauan** yang **tanggap terhadap *gender*** serta penelitian, metodologi dan analisa kebijaksanaan yang berorientasi pada penelitian aksi yang partisipatif, bekerjasama dengan lembaga-lembaga akademis dan para peneliti di daerah.

b Mengadakan evaluasi terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program yang berkaitan dengan dampak ligkungan dan akses masyarakat petani, khususnya perempuan yang sama dalam sumberdaya alam dan dalam menggunakan sumberdaya alam.

c Membuat program-program untuk mengadakan **pusat-pusat pelatihan, penelitian** dan sumberdaya **di perdesaan** dan perkotaan, yang akan menyebarluaskan teknologi-teknologi yang bernuansa lingkungan hidup kepada masyarakat petani, khususnya perempuan. (kader LH!!)

d Mengintegrasikan pengetahuan tradisionil penduduk asli dan praktek pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan dalam rangka pengembangan program dan **penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup**.

e. Penutup.

Pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, apabila dipandang perlu bersama-sama lembaga/organisasi regional dan internasional yang peduli terhadap lingkungan hidup agar mengembangkan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang ramah lingkungan, pelestarian lahan, pengairan, pengelolaan hama terpadu, perencanaan penggunaan tanah, pencegahan bencana alam, serta sumber energi yang baru yang dapat diperbaharui, terutama dipusatkan pada pengetahuan dan pengalaman penduduk asli.

Selanjutnya, mengembangkan strategi perubahan untuk menghapus semua kendala yang menghambat partisipasi penuh dan sama bagi masyarakat petani, khususnya perempuan, dalam pembangunan yang berkelanjutan dan akses yang sama terhadap dan dalam pengendalian sumberdaya.